

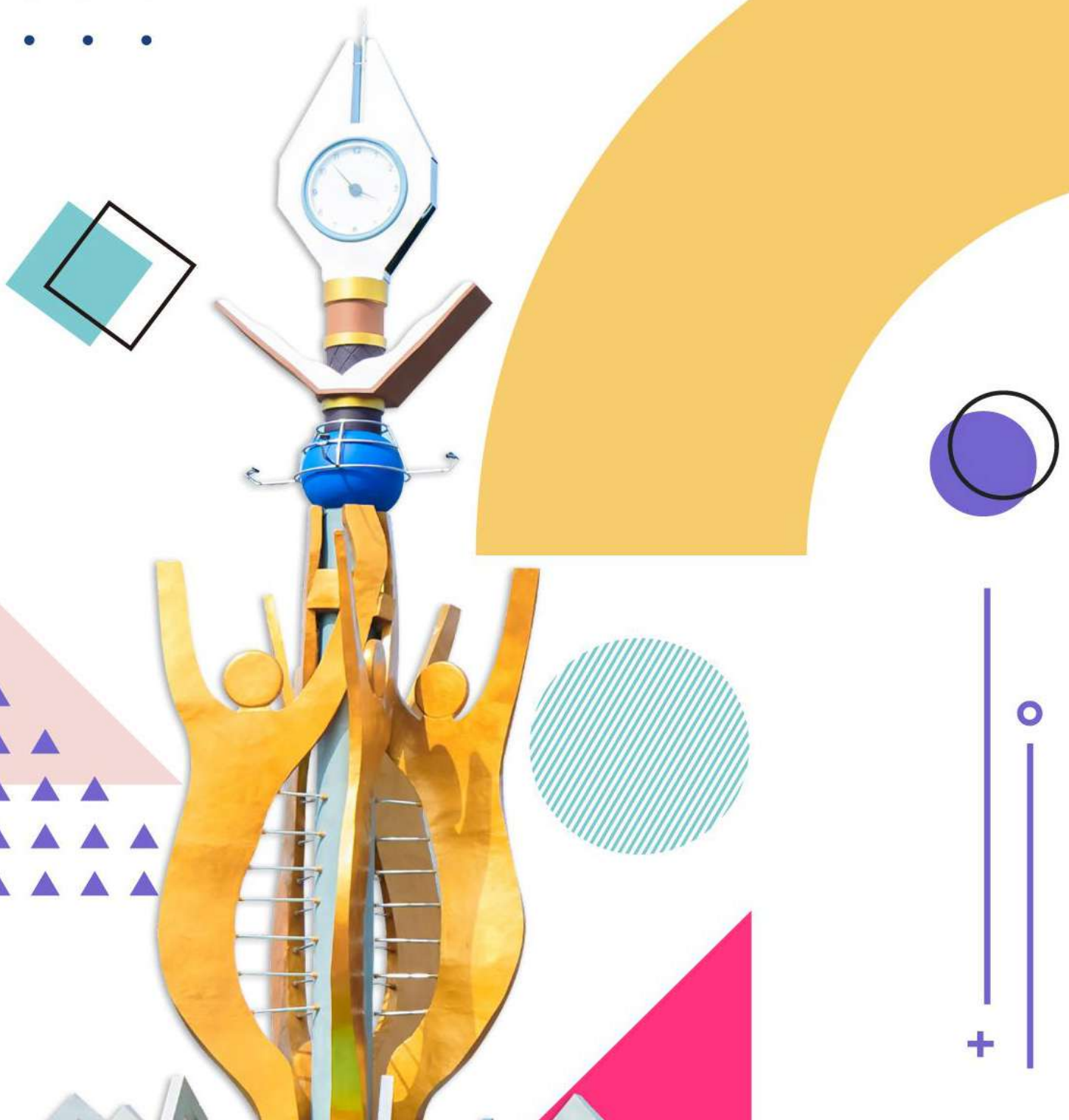


PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

LAKIP

laporan Akuntabilitas Instansui Pemerintah

TAHUN 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Dinas kesehatan Kota Metro tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Metro telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Metro dalam merealisasikan visi dan misi yang merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 yang berupa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan tujuan yang ada yaitu Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran Dinas Kesehatan yaitu : Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan, Meningkatnya ketersediaan farmadi dan alat Kesehatan, dan Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Nilai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 terdiri dari 12 Indikator.


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,
Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19720310 199703 1 006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kedudukan.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan.....	3
1.5 Isu Strategis Dinas Kesehatan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	14
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	15
3.3 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.....	17
Kesehatan Kota Metro Tahun 2021,2022, dan 2023	
Grafik 3.2 Pencapaian Misi Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023.....	19
Grafik 3.3 Angka Kematian Bayi Kota Metro Tahun 2023.....	22
Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran.....	23
Kota Metro Tahun 2019 – 2023	
Grafik 3.5 Prevelensi Stunting di Kota Metro Tahun 2019 – 2023	25
Grafik 3.6 Grafik Succes Rate TB Kota Metro Tahun 2018 – 2023	27
Grafik 3.7 Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	28
Grafik 3.8 Grafik Persentase Obat Essensial Tahun 2018 – 2023	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan.....	3
Kota Metro Tahun 2021	
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi	4
Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023	
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan	9
& Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran OPD	
Tabel 2.2 Matrik Pembangunan RPJMN 2020 -2024	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Metro.....	11
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP.....	14
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro ...	15
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	16
Kota Metro Tahun 2023	
Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi dan Sasaran Dinas Kesehatan	18
Kota Metro Tahun 2023	
Tabel 3.5 Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun Anggaran 2023..	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : PK-RKT Perubahan Tahun 2023
- Lampiran 2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023
- Lampiran 3 : Matrik RKPD Perubahan Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023
- Lampiran 4 : Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023
- Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 6 : SOP Penyusunan SAKIP
- Lampiran 7 : Berita Acara Hasil Evaluasi Internal LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023
- Lampiran 8 : Prestasi Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dokumentasi
- Lampiran 9 : Dokumentasi Rapat Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro
- Lampiran 10 : Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Metro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *KEDUDUKAN*

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2003; pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan salah satunya di bidang kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1.2 *TUGAS POKOK DAN FUNGSI*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro pada Bab 2 pasal 3 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu “**Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan**”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Kesehatan
- c. Pembinaan Dan Fasilitasi Bidang Kesehatan Lingkup Kota Metro
- d. Pelaksanaan Tugas Di Bidang Promosi Kesehatan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Rujukan, Keluarga Dan Gizi, Dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Kesehatan
- f. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Program, Informasi, dan Humas;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Koordinator Kepegawaian, Umum dan Hukum
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari
 - 1) Sub Koordinator Substansi Pelayanan Kesehatan dan kesehatan tradisional\
 - 2) Sub Koordinator Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan
 - 3) Sub Koordinator Substansi mutu dan perizinan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Sub Koordinator Substansi Kefarmasian
 - 2) Sub Koordinator Substansi Alkes dan Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT)
 - 3) Sub Koordinator Substansi Sumber daya Kesehatan
- e. Bidang Pengendalian Penyakit
 - 1) Sub Koordinator Substansi Surveillance dan imunisasi
 - 2) Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 3) Sub Koordinator Substansi pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1) Sub Koordinator Substansi Kesehatan keluarga dan gizi
 - 2) Sub Koordinator Substansi Kesehatan lingkungan dan kesehatan olahraga
 - 3) Sub Koordinator Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) UPTD Puskesmas Metro
- 2) UPTD Puskesmas Yosomulyo
- 3) UPTD Puskesmas Yosodadi
- 4) UPTD Puskesmas Iringmulyo
- 5) UPTD Puskesmas Tejo Agung
- 6) UPTD Puskesmas Margorejo
- 7) UPTD Puskesmas Mulyojati
- 8) UPTD Puskesmas Ganjar Agung
- 9) UPTD Puskesmas Purwosari
- 10) UPTD Puskesmas Karangrejo
- 11) UPTD Puskesmas Banjarsari
- 12) UPTD RSUD Jend. A.Yani
- 13) UPTD RSUD Sumpalsari Bantul

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

Sampai dengan akhir tahun 2023 memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Metro terdiri dari: 11 Puskesmas yang sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan . Dari 11 puskesmas yang ada, 1 puskesmas diantaranya adalah puskesmas perawatan. Jumlah sarana kesehatan lainnya yaitu: 11 Pustu, 125 posyandu dan 137 poskesdel, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.1 JUMLAH SARANA PRASARANA KESEHATAN
KOTA METRO TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH SARANA PRASARANA (Unit)				KET
		PUSKESMAS	PUSTU	POSYANDU	POSKESKEL	
1	Metro Pusat	2	1	44	9	
2	Metro Timur	3	1	30	11	
3	Metro Utara	3	1	21	7	1 rawat inap
4	Metro Barat	2	1	21	10	
5	Metro Selatan	1	1	9	12	
	JUMLAH	11	5	125	137	

Data per-Desember 2023

Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Metro (termasuk puskesmas dan pustu) per 31 Desember 2023 berjumlah orang ASN yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/ golongan sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS: 399	S3 : 0	IV/d : 0	Ess IV = 12	Dokter Spesialis : 5
	S2 : 32	IV/c : 3	Ess III = 5	Dokter Umum : 28
	S1 : 133	IV/b : 4	Ess II = 0	Dokter Gigi : 13
	D4 : 60	IV/a : 22		Perawat : 62
	D3 : 155	III/d : 22		Perawat Gigi : 11
	D2 : 0	III/c : 60		Bidan : 99
	D1 : 0	III/b : 80		Ahli Gizi : 9
	SLTA : 15	III/a : 41		Sanitarian : 11
	SLTP : 0	II/d : 44		Apoteker : 13
	SD : 0	II/c : 41		Kesehatan Masyarakat : 9
	Lain-lain : 4	II/b : 2	II/a : 1	Asisten Apoteker : 11
			I/d : 0	Analisis laboratorium : 0
		I/c : 0	Teknik Elektromedis : 0	
			Radiografer : 0	
		Penata Anastesi : 0		
		Fisioterapis : 0		
		Perekam medis : 8		

Ket: Pegawai Dinas Kesehatan termasuk pegawai RSUD, puskesmas dan pustu

1.5 ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang nantinya akan dijadikan prioritas selama 5 tahun yang akan datang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Penetapan isu strategis ditentukan dari berbagai sumber, mulai dari internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, dan Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJP). Berikut adalah isu strategis yang ada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro:

1) Jumlah Kasus Kematian Ibu dan AKI

Jumlah kematian Ibu di Kota Metro berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka Kematian Ibu di tahun 2022 dan tahun 2023 masih sama yaitu 0 kematian. Angka Kematian Ibu tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 0.

2) Jumlah Kasus Kematian Bayi dan AKB

Jumlah Kasus Kematian bayi di Kota Metro tahun 2022 ada 13 kasus kematian, menurun pada tahun 2023 menjadi 10. Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 yaitu 5,13/1000KH dan tahun 2023 4,07/1000KH.

3) Penyakit TB Paru

Penemuan kasus TB cenderung Fluktuatif. Tahun 2022 angka Penemuan kasus TB Paru di Kota Metro sebesar 497 kasus, pada tahun 2022 penemuan kasus TB naik menjadi 666 kasus. Dengan demikian permasalahan TB masih perlu di waspadai dan ditanggulangi oleh semua pihak.

4) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting pada tahun 2023 cenderung menurun menjadi 4,07 % berdasarkan data eppgbm.

5) Penyakit DBD

Kasus penyakit DBD di Kota Metro mengalami pasang surut dari tahun Tahun 2022 kasus DBD ada 88 kasus, mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 122 kasus.

6) Penyakit HIV-AIDS

HIV-AIDS merupakan permasalahan kesehatan global. Di Kota Metro jumlah penderita HIV-AIDS Tahun 2023 ditemukan 105 kasus, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Metro untuk mencapai visi dan misi Kota Metro adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Metro dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek- aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Metro.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kesehatan, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2021-2026 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

VISI & MISI

Dalam Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021-2026 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Kota Metro. Adapun Visi Pemerintah Kota Metro sesuai dengan RPJMD periode 2021- 2026 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera,
dan Berbudaya.”**

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Berpendidikan : Kota Metro berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila.

Metro Sehat : Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa yang sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya, dan kerifan local. Metro sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatam kehidupan beragama dan budaya gotong royong.

Metro Sejahtera : merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat dan juga diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian.

Metro Berbudaya : merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam upaya menuju visi tersebut, Kota metro menetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.**
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

4. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi kreatif.
5. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Terhormat dan Bermartabat.

Dinas Kesehatan Kota Metro mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi kedua yaitu *Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial*.

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah, serta dengan mempertimbangkan hasil telaah terhadap isu – isu strategi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan untuk periode tahun 2021-2026 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH). Sementara sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran OPD

VISI	Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"2. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial"	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.90	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Angka harapan hidup 	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan - Meningkatkan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	Persentase Peserta JKN
									Angka Harapan Hidup
									Jumlah kasus kematian ibu
									Jumlah kasus kematian bayi
									Prevalensi stunting pada anak balita
									Success rate TB
									Persentase puskesmas dengan tenagakesehatan sesuai standar
									Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
Indeks keluarga sehat									

Tabel 2.2 Matrik Pembangunan RPJMN 2020 -2024

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas (PP)	Indikator	Target RPJMN					Target RPJMD Provinsi Lampung					Target RPJMD Kota Metro				
			2020	2021	2023	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan/Program	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83	85	87	90	98	83	85	87	90	98	83,54	85	90	95	98
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,52	71,61	71,88	71,90	71,99	70,65	70,73	70,99	71,00	71,2	71,63	71,76	71,90	72,04	72,18
3		Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	230	217	205	194	183	85	75	70	65	60	5	3	3	3	2
4		Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	15,4	14,6	13,2	12,4	11,3	4,64	4,64	4,36	4,36	4,01
5		Prevalensi Stunting pada Balita	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0	25,18	23,08	20,98	18,88	16,78	9,91	9,91	9,5	9	9
6		Angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
7		Persentase Puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	90%	91%	91,5%	92%	93%	90%	91%	91,5%	92%	93%	90%	91%	92%	93%	94%
8		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85%	90%	92%	94%	96%	85%	90%	92%	94%	96%	88%	90%	92%	94%	96%
9		Indeks Keluarga Sehat	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,20	0,22	0,27	0,35	0,35

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Walikota Metro . Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021 – 2026 yang telah dilakukan review. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Metro untuk mencapainya dalam Tahun 2023 Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Metro

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya upaya kesehatanperorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3
		Jumlah kasus kematian bayi	11
		Prevalensi stunting pada anak balita	9%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%
2	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	93%
3	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%

4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,35%
---	---	-----------------------	-------

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Kesehatan Kota Metro mendapat dukungan anggaran sebesar 343.221.061.270 (senilai 219.108.411.937) merupakan anggaran pada kegiatan peningkatan pelayanan pada 11 puskesmas BLUD) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang terangkum dalam 5 program dan 18 kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1		3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5.	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

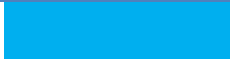



3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode Warna
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	
3.	55% s.d 75%	Cukup (C)	
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)	

3.2 *Capaian Kinerja Tahun 2023*

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase JKN di dapat dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dengan perhitungan jumlah peserta yang dibayarkan pemerintah atau perorangan dibagi dengan total Jumlah penduduk. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
2	Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut didapat dengan memperhitungkan berbagai faktor diantaranya faktor sosial maupun ekonomi. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
3	Jumlah kasus kematian ibu	Jumlah kasus kematian ibu merupakan kasus kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
4	Jumlah kasus kematian bayi	Jumlah kasus kematian bayi merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai satu tahun. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
5	Prevalensi stunting pada anak Balita	Prevalensi stunting dihitung dengan melihat tinggi badan anak balita yang diukur pada saat melakukan posyandu. Perhitungan prevalensi stunting dihitung dengan cara banyaknya anak balita yang mengalami stunting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur TB nya dikali dengan 100 persen. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
6	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yaitu semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
7	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah tenaga yang memiliki kesesuaian pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.

8	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Obat esensial merupakan obat yang harus ada di fasilitas kesehatan dan memenuhi standar ketersediaan obat esensial di Puskesmas. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
9	Indeks keluarga Sehat	Indeks keluarga Sehat dihitung dengan cara merekapitulasikan data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi 3 dengan Klasifikasi Keluarga Sehat (IKS> 0,800) , Keluarga Pra Sehat (IKS =0,500-0,800) , dan Keluarah Tidak Sehat (IKS <0,500). Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Metro juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

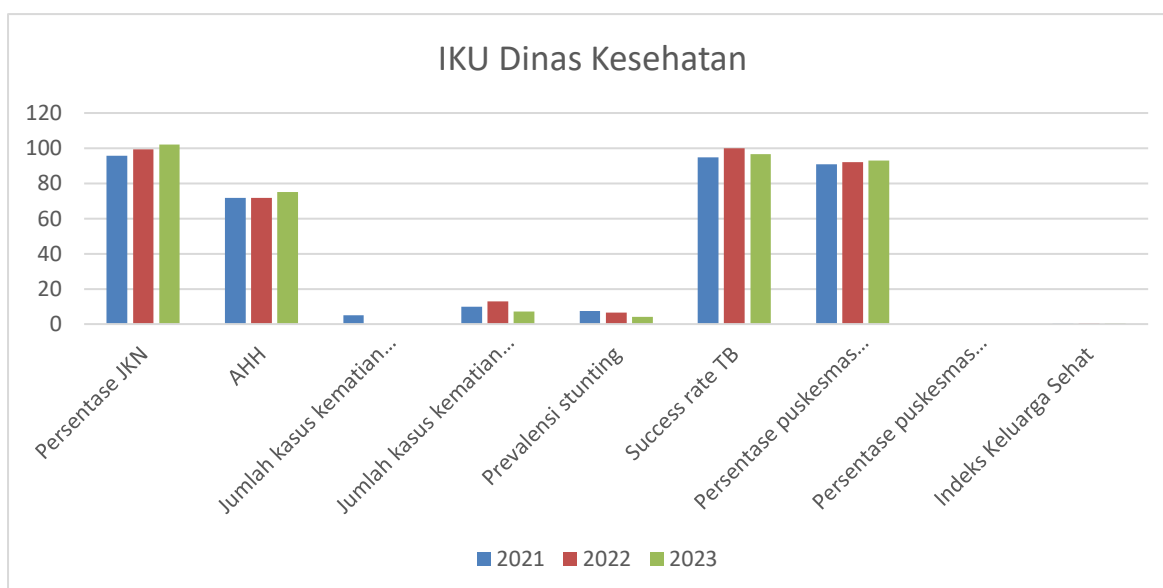
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	102,22%	108 %	
2	Angka Harapan Hidup	72,04	75,14	104%	
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	3	0	100%	Tidak ada kasus kematian ibu
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	11	7	157%	
5	Prevalensi Stunting pada Anak Balita	9%	4,07%	221%	
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TBC) (<i>suscces rate</i>)	95%	96,72%	102%	
7	Prevalensi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	93%	93%	100%	
8	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94%	100%	106,3%	
9	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,4	114,2%	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 9 indikator sudah memenuhi target , sehingga capaian nya sudah >100 %.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021, 2022, dan 2023



Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa untuk realisasi dari 9 indikator, yaitu:

- (1) Indikator persentase JKN tahun 2023 (102,22%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 (95,72%) dan 2022 (99,41%) dengan *ukuran keberhasilan kinerja* jika realisasi lebih tinggi dari target atau dari tahun sebelumnya;
- (2) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan yaitu pada tahun 2023 75,14.
- (3) Indikator jumlah kasus kematian ibu menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 0 kasus dari tahun 2021 berjumlah 5 kasus. Jumlah kasus kematian ibu memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai dengan renstra.
- (4) Indikator jumlah kasus kematian bayi tahun 2023 ada 10 kasus kematian bayi, sedangkan tahun 2022 ada 13 kasus dan tahun 2021 ada 10 kasus. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (5) Indikator prevalensi stunting pada balita tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang semula 6,67 % menjadi 4,07 %. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (6) Indikator Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*success rate*) tahun 2023

(96,72%), pada tahun 2022 (100%) dan 2021 (96,5%). Walaupun terjadi penurunan pada tahun sebelumnya, namun target capaian sudah tercapai.

(7) Indikator persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2023 (94%) menunjukkan kenaikan dengan realisasi tahun 2022 (92%) dan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 (91%).

(8) Indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2023 (100%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2021 (100%) dan tahun 2020. Hal ini sudah memenuhi target capaian.

(9) Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2023 (0,4) menunjukkan peningkatannya dari tahun 2022 (0,38) dan tahun 2021 (0,23). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.

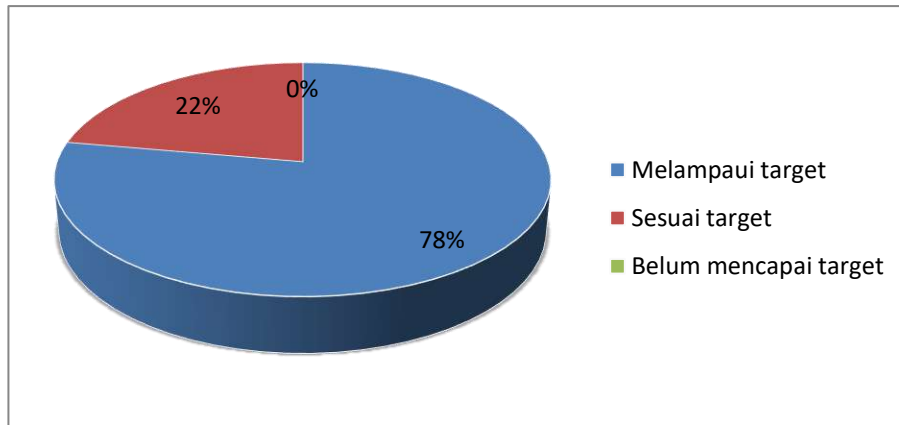
Secara umum Dinas Kesehatan Kota Metro telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Target Misi Dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023

NO	MISI	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2	Waras : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial.	10	7	77,78	2	22,2	0	0
JUMLAH			10	7	77,78	2	22,2	0	0

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pencapaian Misi ke-2 dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan dengan jumlah indikator sasaran sebanyak 9 indikator : 5 indikator melebihi target (55,55%), 3 indikator sesuai target (33,3%) dan 1 indikator belum mencapai target (1,11%). Pencapaian Misi Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2 Pencapaian Misi
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023



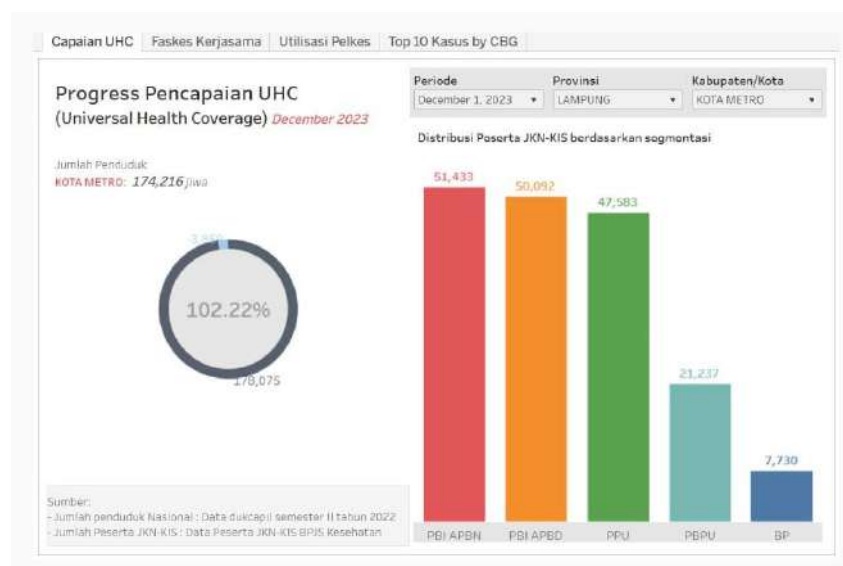
Rincian pencapaian indikator kinerja pada misi ke-2 Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dan sosial terdiri dari 1 sasaran dengan 7 indikator sasaran yang akan dicapai, antara sebagai berikut :

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan, pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dengan 9 indikator sasaran antara lain:

1. Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2023 sudah mencapai target yaitu realisasinya sebesar 102,22% dengan target 95%. Hal ini sudah memenuhi capaian target sebesar 107,6%. Dalam pelaksanaannya banyak peserta BPJS yang masih dibebankan ke pemda sehingga dana dikhawatirkan kurang, maka dari itu solusi yang diberikan adalah penarikan kepesertaan ke PBI APBN dan Jamkes Prov dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.



Pencapaian UHC Kota Metro tahun 2023

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh

keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik baik secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada terjaminnya kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kota Metro tahun 2023 yaitu 75,14 tahun. Angka harapan Hidup terus meningkat setiap tahunnya.

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. The main content is a table titled 'Angka Harapan Hidup Penduduk (tahun)' (Life Expectancy of the Population in years). The table lists 17 districts and their life expectancy values for the years 2020, 2021, and 2022. The data is as follows:

Wilayah	2020	2021	2022
Lampung Barat	67,58	67,65	67,90
Tenggamus	68,56	68,67	68,95
Lampung Selatan	69,33	69,42	69,69
Lampung Timur	70,73	70,78	71,01
Lampung Tengah	69,84	69,87	70,09
Lampung Utara	69,21	69,20	69,57
Way Kanan	69,40	69,46	69,69
Tulang Bawang	69,97	70,01	70,22
Pesisiran	69,04	69,15	69,44
Pringsewa	70,08	70,27	70,65
Metuji	68,19	68,26	68,51
Tulang Bawang Barat	70,50	70,03	70,23
Pesisir Barat	63,50	63,66	63,99
Bandar Lampung	71,37	71,42	71,66
Metro	71,63	71,66	71,88
Provinsi Lampung	70,65	70,73	70,99
Metode Lama			

Sumber : Website BPS Provinsi Lampung

3. Jumlah Kasus Kematian Ibu

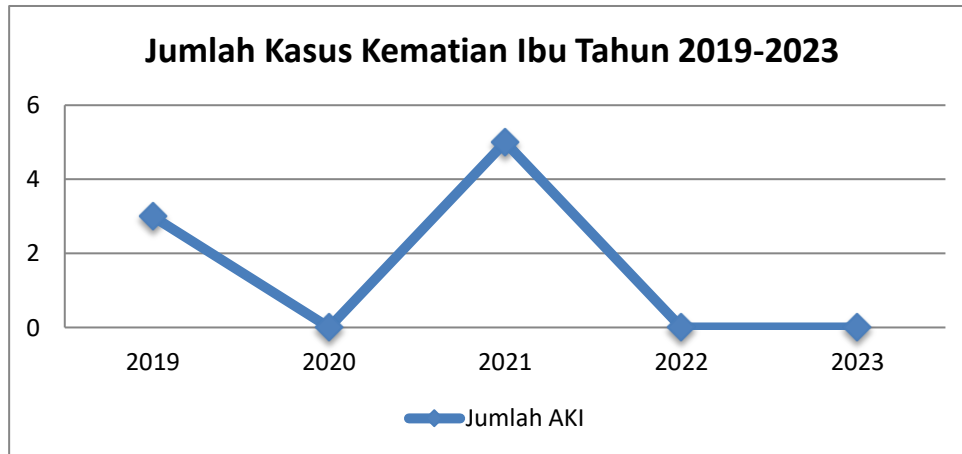
Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu merupakan cermin status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran

perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Untuk jumlah kasus kematian ibu maternal selama kurun waktu tahun 2019-2023 berfluktuasi namun cenderung menurun seperti tampak pada gambar berikut:

Grafik 3.3 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kota Metro tahun 2019-2023



Jumlah kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus, tahun 2020 tidak ada kematian ibu, tahun 2021 meningkat kembali menjadi 5 kasus dan pada tahun 2023 kembali menjadi 0 kasus tidak ada kasus kematian ibu.

Capaian kinerja kasus kematian ibu pada tahun 2023 sudah sesuai target karena tidak ada kasus kematian ibu. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika realisasinya ada dibawah target. Faktor pendorong tercapainya target ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu, antara lain:

- 1) Inovasi JAMAPAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
- 2) Kelas rutin Ibu Hamil di posyandu
- 3) Pemeriksaan USG pada ibu hamil
- 4) Kunjungan ibu nifas (KF)



Kegiatan Posyandu tahun 2023



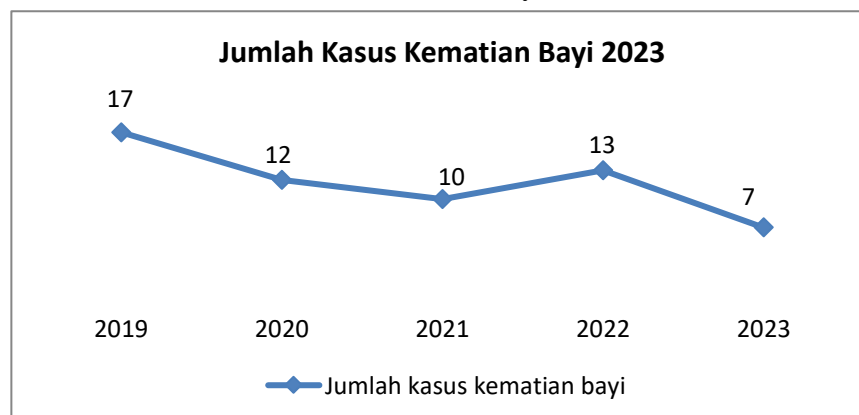
Kegiatan rematri dan usg pada ibu hamil tahun 2023

4. Jumlah Kasus Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi. AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) jumlah kasus kematian bayi di Kota Metro berfluktuasi, pada tahun 2019 terdapat 17 kasus, pada tahun 2020 menurun menjadi 12 kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi 10 kasus, pada tahun 2022 terjadi kenaikan kasus menjadi 13 kasus, dan tahun 2023 menurun menjadi 7 kasus. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Grafik 3.4 Jumlah Kasus Kematian Bayi Kota Metro Tahun 2023



Sumber: Seksi Kesga dan gizi Dinas Kesehatan Kota Metro

Kasus kematian bayi tahun 2023 sebanyak 7 kasus yang disebabkan oleh afiksia, BBLR, dan prematur.

Capaian kinerja kasus kematian bayi sebesar 2,7 (7/2543). Faktor pendukung capaian targer ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi , antara lain :

- 1) Kunjungan neonatus;
- 2) Kujungan pada bayi yang sakit;
- 3) dan posyandu yang rutin dilakukan setiap bulan;
- 4) MTBS



Kegiatan Kunjungan neonotus

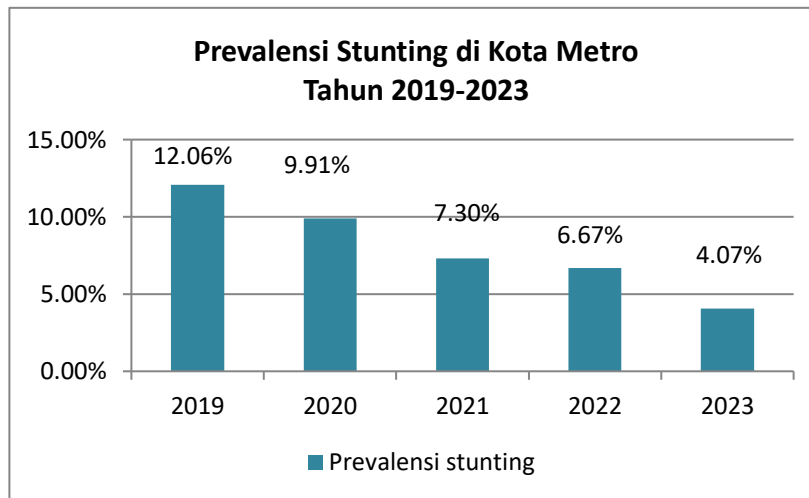
5. Prevalensi stunting pada anak Balita

Stunting menggambarkan suatu keadaan malnutrisi yang kronis dan anak memerlukan waktu untuk berkembang serta pulih kembali menuju keadaan tinggi badan anak yang normal menurut usianya. Prevalensi stunting yang tinggi di dunia maupun di Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan stunting banyak mendapat perhatian sebagai masalah kekurangan gizi kronis dalam bentuk anak pendek. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya perkembangan kemampuan motorik dan mental anak. maka dari itu perlunya angka penurunan stunting di Indonesia.

Salah satu indikator pemantauan pertumbuhan balita adalah dengan melihat partisipasi masyarakat terhadap bayi yang datang ditimbang (D/S). Balita ditimbang adalah jumlah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di Posyandu dan tempat penimbangan balita. Balita Pendek adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi.

Prevalensi stunting menjadi salah satu isu strategis yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Metro. Berikut adalah grafik prevalensi stunting di Kota Metro selama 5 tahun terakhir.

Grafik 3.5 Prevalensi Stunting di Kota Metro Tahun 2019– 2023



Sumber : Sie kesga dan gizi Dinas Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penurunan angka stunting yaitu diantaranya memulai pencegahan dari remaja putri, catin (calon pengantin), ibu hamil yang mengalami KEK hingga pada bayi yang sudah lahir. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya stunting di Kota Metro :

- 1) Pemberian Vitamin A
- 2) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada rematri (remaja putri)
- 3) Pemberian TTD pada Ibu hamil
- 4) Pemberian PMT Lokal untuk balita gizi kurang, BB Kurang, Balita tidak naik BB, dan Ibu hamil KEK
- 5) Penyuluhan dan Sosialisasi PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak)
- 6) Pemantauan pertumbuhan Anak Balita (SDIDTK) di posyandu

Namun masih terdapat kurangnya kesadaran Ibu Balita membawa anaknya ke psoyandu, dan kurangnya kesadaran ibu balita untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan.



Pemantauan pertumbuhan di posyandu



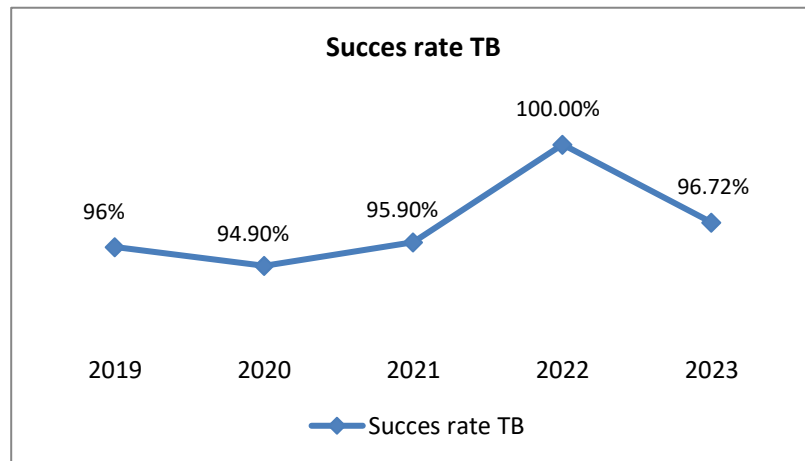
Pemberian PMT pada balita Gizi Kurang dan Bumil KEK

6. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)

Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis mempresentasikan tentang kejadian kasus tuberkulosis yang diobati. Jika persentase semakin besar maka akan semakin baik cakupan penyembuhan tuberkulosis.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka berhasil tuberkulosis cenderung meningkat. Angka keberhasilan pengobatan (succses rate) TB tahun 2019 yaitu 96%, tahun 2020 succes rate TB menurun menjadi 94,9 %, tahun 2021 meningkat menjadi 96,5 %, tahun 2022 ini menjadi 100 % dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 96,72%. Meskipun angka keberhasilannya menurun namun sudah memnuhi target (95%)

Grafik 3.6 Grafik Succes Rate TB Kota Metro Tahun 2019 – 2023



Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis ini didukung dengan berbagai kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan investigasi kontak
- 2) Inovasi penemuan suspek TBC yaitu JAMOU TB (Jaring Aktif, Mobilisasi TB, Tuntaskan Tuberkulosis)
- 3) GENCAR ENDUS TB (Gerakan Pencarian Penderita dan Suspek TB)
- 4) Tersedianya logistik cartridge TCM sebagai alat diagnosis TBC
- 5) Tersedianya logistik OAT dan Non OAT



Kegiatan JAMOU TB oleh sub koor P2



Kegiatan GENCAR ENDUS TB oleh sub koor P2

7. Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Puskesmas Mempunyai 9 Jenis Tenaga Kesehatan adalah Puskesmas yang minimal telah memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM (ahli teknologi laboratorium medik), apoteker, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.

Jumlah persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 mencapai 93 % , kota metro memiliki 11 puskesmas di wilayah kerjanya dari 11 puskesmas tersebut terdapat 10 puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar dan terdapat 1 puskesmas yang belum lengkap terlihat pada tabel berikut.

Grafik 3.7 Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar



Yang mendorong tercapainya kinerja diatas yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan Dinas Kesehatan Kota Metro dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pengadaan Tenaga Kontrak Daerah agar formasi penerimaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Metro. Pada rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2023 ini, BKPSDM telah melibatkan Dinas Kesehatan dalam penentuan formasi bagi CPNS dan PPPK tahun 2023 serta pengajuan pengisian E-Formasi 2020-2024. Data perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan oleh Dinas Kesehatan telah digunakan

sebagai dasar perencanaan kebutuhan tingkat kota.

- 2) Pemerataan jumlah dan jenis tenaga SDM di Kota Metro sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan harus terus diupayakan. Dinas Kesehatan Kota Metro akan memantau distribusi tenaga kesehatan yang merata dan akan melakukan redistribusi bila diperlukan.
- 3) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui beberapa program pemerintah juga dapat ditingkatkan, misalnya melalui Program Internship Dokter Indonesia (PIDI). Dinas Kesehatan Kota Metro pada tahun 2023 telah memanfaatkan tenaga dokter Internsip pada 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Ganjar agung dan Puskesmas Mulyojati, dan telah mengajukan penambahan wahana PIDI untuk periode selanjutnya. Kedepannya Dinas Kesehatan Kota Metro akan mengusahakan kembali pemenuhan tenaga kesehatan melalui program program yang lain.
- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga melalui beberapa mekanisme, seperti percepatan regulasi terkait, pengesahan status BLUD, peningkatan pendidikan pada tenaga kesehatan terutama dokter, pengadaan tenaga kontrak daerah untuk Dokter Spesialis, tenaga radiografer, dan dokter umum.

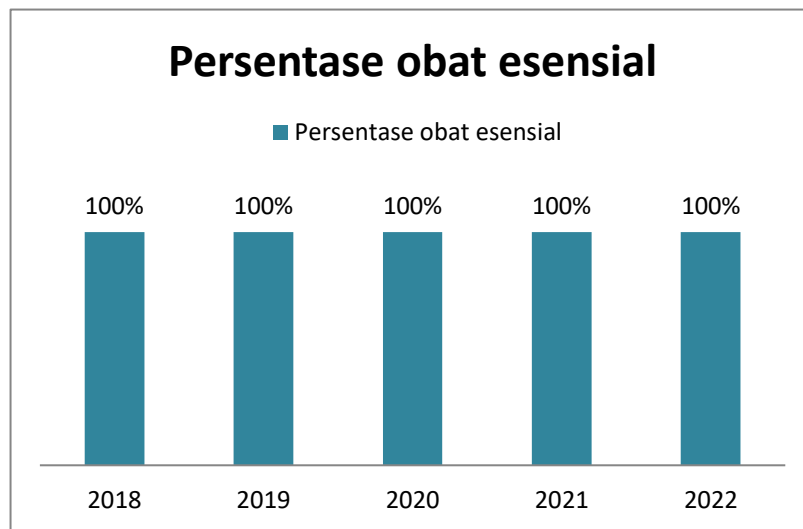
Sedangkan factor yang menghambat yaitu :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan dukungan sumberdaya bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan masih terbatas.
- 2) Kemampuan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan masih terbatas.
- 3) Kurang sinkronisasi antara pengadaan, kebutuhan dan distribusi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 4) Ketersediaan data SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan validitas dan juga keterkinian dari data eksisting. Perlu kesadaran tinggi dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan update data SDM kesehatan secara berkala.
- 5) Ketersediaan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar minimal kebutuhan yang ditetapkan Kemenkes RI.
- 6) Terbatasnya jumlah SDM kesehatan yang ada membuat tenaga fungsional di sarana pelayanan kesehatan melaksanakan tugas program kesehatan lebih dari satu, sehingga capaian kegiatan program kurang maksimal.
- 7) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak menyebabkan penghitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja menjadi berkurang banyak untuk kebutuhan SDM kesehatannya, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta

8. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling mendasar dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang harus tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai fungsi dan tingkatnya. Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bahwa ketersediaan obat sesuai kebutuhan dasar paling tidak sekitar 90%. Pengelolaan obat yang fleksibel bisa menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan harga obat, khususnya obat esensial pada sarana kesehatan dasar. Ketersediaan obat sangat menentukan efektifitas pengobatan pada sarana kesehatan pemerintah. Ketersediaan obat esensial merupakan salah satu isu strategis yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Metro. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sesuai standar bisa dilihat dengan grafik dibawah ini.

Grafik 3.8 Grafik Persentase Obat Essensial Tahun 2018 – 2023



Grafik diatas menunjukkan cakupan ketersediaan obat esensial sudah terpenuhi yaitu sebesar 100%. Pengisian ketersediaan obat esensial ini dilakukan diaplikasi SELENA (sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian).

Indeks Keluarga Sehat	2021	2022	2023
Kota Metro	0,23	0,38	0,4

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan IKS, Antara lain :

- 1) Meningkatkan Manajemen Pendekatan keluarga terintegrasi dengan manajemen Puskesmas yang dilakukan mulai dari proses perencanaan (P1), pergerakan pelaksanaan (P2) sampai proses pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3). Langkah pertama adalah Persiapan yang didalamnya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pengorganisasian.
- 2) Meningkatnya jumlah kunjungan Pembina Keluarga melakukan kunjungan rumah (Intervensi PIS-PK) keluarga menggunakan formulir Prokesga (tercetak/manual) dan elektronik (aplikasi keluarga sehat) serta promosi kesehatan dengan menggunakan pinkesga.
- 3) Telah dilakukan workshop bagi pengelola program PIS PK di Puskesmas untuk menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS) serta melakukan analisis data menggunakan aplikasi Inarata, SPSS dan manual dengan raw data.
- 4) Kemudian Pembina Keluarga melakukan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah dalam upaya intervensi masalah kesehatan dari hasil analisis sesuai kemampuan dan kewenangannya dan juga melaksanakan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM.
- 5) Peningkatan Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Metro Tahun 2023 Sebesar 99.98%.
- 6) Deklarasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK.
- 7) Terdapat program inovasi di puskesmas yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK diantaranya GERTAK PAPI (Gerakan Serentak Pengobatan pasar Pagi),GEROBAK CEPER (Gerakan Posbindu Keliling Untuk Cegah Penyakit Tidak Menular), Gercep Tilar Madu Karim (Gerakan Pencegahan penyakit Tidak Menular dan Masyarakat Peduli Kanker Leher Rahim), Posbindu Mobile, KUNTJII (Kunjungan Rutin Gangguan Jiwa), OKE TB, Program HOMECARE, Laskar Waras, TTM (Teman TBC Masyarakat).



Dokumentasi pertemuan Koordinasi Teknis PIS-PK terintegrasi program tahun 2023



Dokumentasi kegiatan intervensi keluarga tahun 2023

Namun ada beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IKS diantaranya :

1. Perbedaan Data KK yang berbeda antara BPS, Disdukcapil dan real di lapangan
2. Mobilisasi keluarga yang tinggi, saat melaksanakan kunjungan rumah dan intervensi rumah yang dikunjungi tidak ada di rumah, karena pada umumnya masyarakat disini pagi atau siang sedang bekerja di sawah dan kebun atau di pasar.
3. Tingginya jumlah anggota keluarga yang merokok sehingga pada indikator keluarga sehat nomor 9 masih rendah capaiannya.

Integrasi program UKM dan PISPK belum berjalan maksimal.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.488.960.444,00	281.701.790.306,00	99%
		Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.635.450,00	163.152.067,00	89%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.069.550,00	53.664.250,00	85%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.600.000,00	19.164.940,00	93%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.999.900,00	19.892.630,00	99%
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.700.000,00	21.176.570,00	69%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.266.000,00	49.253.677,00	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.908.875.901,00	62.330.546.974,00	99%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.847.363.301,00	58.321.188.319,00	99%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.029.501.600,00	3.977.399.255,00	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.011.000,00	18.999.500,00	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	13.000.000,00	12.959.900,00	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.665.000,00	114.420.700,00	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.665.000,00	45.458.850,00	100%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	47.000.000,00	46.999.200,00	100%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000,00	21.962.650,00	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.454.440,00	480.436.232,00	99%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.265.800,00	13.890.800,00	97%
	Penyediaan Bahan Logistik	94.286.140,00	94.207.200,00	100%	

Kantor			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.745.500,00	79.737.375,00	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.570.000,00	90.395.000,00	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.587.000,00	202.205.857,00	99%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.044.992,00	227.194.973,00	98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.444.992,00	220.594.973,00	95%
Peningkatan Pelayanan BLUD	219.108.411.937,00	217.937.489.801,00	99%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	219.108.411.937,00	217.937.489.801,00	99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.872.724,00	448.549.559,00	99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.670.000,00	41.802.379,00	98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.930.000,00	208.862.567,00	99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.969.750,00	31.752.000,00	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.531.974,00	139.692.613,00	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.771.000,00	26.440.000,00	99%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.467.780.378,00	53.007.163.232	93%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.926.152.728,00	18.236.297.724,00	92%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	240.000.000,00	239.687.175,00	100%
Pengembangan Rumah Sakit Rumah Sakit Sumbersari Bantul	2.969.550.000,00	2.530.403.119,00	85%
Pengembangan Puskesmas	435.000.000,00	359.578.890,00	83%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.609.030,00	27.603.000,00	100%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	10.756.240.000,00	10.174.319.871,00	95%

Kesehatan (RSU A. YANI & DINAS)			
Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kalibrasi	133.749.350,00	127.466.555,00	95%
Pengadaan Obat Vaksin	4.439.052.870,00	3.852.287.636,00	87%
Pengadaan Habis Pakai	924.951.478,00	924.951.478,00	100%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.992.434.550,00	34.268.203.968,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000,00	96.459.200,00	96%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33.700.000,00	32.807.600,00	97%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	44.500.000,00	40.636.422,00	91%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.000.000,00	69.741.050,00	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.534.200,00	23.904.305,00	84%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.129.300,00	9.559.300,00	79%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	54.018.000,00	53.940.600,00	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	219.470.200,00	211.039.000,00	96%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.170.000,00	37.670.000,00	91%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	43.836.600,00	88%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	147.004.850,00	144.211.250,00	98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	31.215.200,00	31.074.600,00	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	61.500.000,00	59.809.150,00	97%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30.000.000,00	29.738.905,00	99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	115.650.000,00	113.475.093,00	98%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.000.000,00	105.923.350,00	98%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80.084.000,00	79.933.500,00	100%
Pengelola Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14.170.000,00	10.970.000,00	77%
Pengelola Upaya Kesehatan Khusus	140.987.600,00	134.822.765,00	96%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.249.719.200,00	17.241.338.213,00	100%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	20.000.000,00	17.000.000,00	85%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	116.500.000,00	103.932.800,00	89%
Penyediaan Telemedicine di	37.000.000,00	26.633.600,00	72%

Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.145.000.000,00	7.027.103.271,00	98%
Operasional Pelayanan Dinas Kesehatan & Operasional Puskesmas	9.622.622.000,00	8.141.648.559,00	85%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	330.000.000,00	317.713.835,00	96%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	71.490.200,00	68.450.420,00	96%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	17.460.100,00	17.024.360,00	98%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	54.030.100,00	51.426.060,00	95%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477.702.900,00	434.211.120,00	84%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.302.900,00	338.347.980,00	95%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	51.400.000,00	41.667.500,00	81%
Penyiapan Perumusandan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	72.000.000,00	54.195.640,00	75%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.071.857.500,00	1.053.717.358,00	99%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90.500.000,00	90.300.350,00	100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	50.000.000,00	49.987.900,00	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.500.000,00	40.312.450,00	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	981.357.500,00	963.417.008,00	98%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	981.357.500,00	963.417.008,00	98%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	169.163.100,00	134.841.466	79%

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	141.413.100,00	109.505.911,00	77%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	141.413.100,00	109.505.911,00	77%
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	27.750.000,00	25.331.555,00	91%
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	27.750.000,00	25.331.555,00	91%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.848.620.000,00	1.802.998.387,00	98%
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	369.774.000,00	351.635.797,00	95%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	369.774.000,00	351.635.797,00	95%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.196.000,00	52.717.390,00	99%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	53.196.000,00	52.717.390,00	99%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.398.650.000,00	1.398.645.200,00	100%
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.398.650.000,00	1.398.645.200,00	100%
	JUMLAH	343.221.061.270,00	337.901.545.884,00	98%

Dalam pelaksanaannya setiap sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan untuk realisasi kegiatan dan anggaran sudah 100%. Namun pada realisasi anggaran terdapat beberapa anggaran yang belum mencapai 100%, dikarenakan beberapa hal yaitu:

- 1) Kegiatan yang terlaksana di Dinas Kesehatan tidak bersifat rutinitas saja, namun ada beberapa kegiatan yang inovatif dan dijadikan kegiatan prioritas Dimana dalam hal pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun yang bersangkutan/ sesuai dengan kebutuhan yang ada. Perencanaan anggaran adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran yang terserap di beberapa kegiatan disesuaikan dengan banyaknya kasus yang ada di lapangan. Oleh karena itu, semakin sedikit kasus yang ada maka persentase penyerapan anggaran juga semakin kecil.
- 2) Adanya sumber anggaran lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan yaitu APBN (BOK, Jampersal), JKN.
- 3) Adanya efisiensi anggaran khususnya pada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui negosiasi harga barang / jasa.
- 4) Adanya refocusing anggaran di akhir tahun untuk pemenuhan program prioritas lain

3.4 *SDM yang ada pada Dinas Kesehatan*

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kota Metro didukung oleh sumber daya manusia yang ada baik berstatus sebagai ASN maupun tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari Golongan :
 - Golongan IV : 40
 - Golongan III : 268
 - Golongan II : 86
 - Golongan I : 0
- b. Ditinjau dari Jabatan
 - Eselon II : 1
 - Eselon III : 5
 - Eselon IV : 14
 - JFU : 88
 - JFT : 310

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2023 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena dari 6 indikator yang terdapat pada sasaran strategis terdapat 1 indikator (16,67%) melebihi target 100% dan 4 indikator (66,66%) sesuai target 100%, hanya 1 indikator (16,67) yang belum mencapai target 100%, antara lain yaitu:

- (1) Indikator persentase JKN tahun 2023 (102,22%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 (99,41%) dan 2021 (95,72%) dengan *ukuran keberhasilan kinerja* jika realisasi lebih tinggi dari target atau dari tahun sebelumnya.
- (2) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan angka sesuai target dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
- (3) Indikator jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 dan tahun 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 0 kasus dari tahun 2021 berjumlah 5 kasus. Jumlah kasus kematian ibu memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai dengan renstra.
- (4) Indikator jumlah kasus kematian bayi tahun 2023 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya yaitu ada 7 kasus kematian bayi, sedangkan tahun 2022 ada 13 kasus dan tahun 2021 ada 10 kasus sehingga dapat memenuhi target capaian.
- (5) Indikator prevalensi stunting pada balita tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yang semula 6,67 % menjadi 4,077%. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (6) Indikator Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*success rate*) tahun 2023 (96,72%) menunjukkan penurunan dari tahun 2022 (100%). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian (95%).
- (7) Indikator persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2023 (93%) menunjukkan kenaikan dengan realisasi tahun 2022 (92%) dan cenderung

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 (91%).

(8) Indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2023 (100%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2022(100%) dan tahun 2021. Hal ini sudah memenuhi target capaian.

(9) Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2023 (0,4) menunjukkan peningkatannya dari tahun 2020 (0,23) dan tahun 2021 (0,376). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.

Dalam indikator IKU ada beberapa penghambat sehingga upaya-upaya yang dapat kami lakukan untuk mencapai target kegiatan seperti :

1. Perlu dilakukannya monitoring lebih mendalam tentang pemantauan pertumbuhan balita agar banyak balita yang melakukan operasi timbang sehingga pemantauan tinggi badan dan berat badan anak dapat terukur, apabila terindikasi stunting bisa dilakukan penanganan lebih lanjut.
2. Perlu dilakukan promosi Kesehatan lebih lanjut terkait peningkatan indikator Indeks Keluarga Sehat, seperti masih tingginya angka merokok sehingga belum bisa menjadikan kota metro dengan indeks IKS yang baik. Ada perbedaan data antara data BPS dan KK disdukcapil maka diperlukannya koordinasi untuk mensinkronkan data tersebut. Dan masih tingginya mobilisasi, Masyarakat dalam kunjungan rumah sehingga nakes yang akan melaksanakan intervebsi kunjungan rumah tidak dapat menemui keluarga yang bersangkutan, maka dari itu perlu koordinasi antara petugas kunjungan rumah dengan stakeholder setempat.
3. Perlu menjaga hubungan dan koordinasi yang baik dari berbagai lintas sektor dalam mewujudkan angka harapan hidup dan kepersertaan JKN yang lebih baik. Sehingga kinerja dapat tercapai sesuai target atau lebih.
4. Perlu pengkajian lebih lanjut terkait kebutuhan SDM Kesehatan dalam memenuhi standar nakes yang diperlukan dipuskesmas. Sehingga tidak terjadi kekurangan tenaga Kesehatan dan dapat menunjang akses pelayanan kesehatan lebih baik lagi.
5. Mengalokasikan anggaran secara tepat dan efisien untuk mendukung sarana/prasana kesehatan yang lebih baik.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. A. Yani No. 02 Kota Metro

Email: dinkeskotametro1@gmail.com Website: www.metrokota.go.id

PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. EKO HENDRO SAPUTRA,ST.,M.Kes**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Met ro**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. WAHDI, Sp.OG (K),M.H**
Jabatan : **Wali Kota Metro**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

WALI KOTA METRO



dr. WAHDI, Sp.OG (K), M.H

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA METRO,




Dr. EKO HENDRO SAPUTRA,ST.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19720310 199703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
OPD DINAS KESEHATAN KOTA METRO**

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3
		Jumlah kasus kematian bayi	11
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,0%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%
2	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	93%
3	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Indeks Keluarga Sehat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Indeks Keluarga Sehat	0,35 tidak sehat
5	Terpenuhinya administrasi dan program penunjang perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	273.692.857.042	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.467.780.378	APBD, DAK, BLUD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.071.857.500	APBD

4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	169.163.100	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.821.620.000	APBD

Metro, November 2023

Pihak Kedua,

WALI KOTA METRO



dr. WAHDI, Sp. OG (K), M.H

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA METRO,



Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19720310 199703 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN

OPD : Dinas Kesehatan
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3
		Jumlah kasus kematian bayi	11
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,0%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%
2	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	93%
3	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Indeks Keluarga Sehat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Indeks Keluarga Sehat	0,35 tidak sehat
5	Terpenuhinya administrasi dan program penunjang perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%

Metro, November 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,



Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST., M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19720310 199703 1 006

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase peserta JKN	95%	102,22 %	107,6%
				Angka Harapan Hidup	72,04	75,14	104,3%
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kasus Kematian ibu	3	0	100%
				Jumlah kasus kematian bayi	11	7	157%
				Prevalensi stunting pada anak balita	9,0%	4,07%	221%
				Angka Keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	95%	96,72%	101,8%
			Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengantenaga Kesehatan sesuai standar	93%	93%	100%
			Meningkatnya ketersediaan farmasi dana alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%	100%	106,3%
			Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,4	114,2%

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Metro



Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19720310 199703 1 006

**RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

DINAS KESEHATAN KOTA METRO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
1	2	3	9	10	11	12	13= 11-6	14= 13/6*100
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				343,221,061,270		55,170,038,942	1915%
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kota Metro	7 kegiatan	283,690,640,292		56,186,782,164	2470%
1 02 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	Kota Metro	14 dokumen	183,635,450		1,769,550	97%
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Metro	2 dokumen	63,069,550	PAD	1,830,450	-282%
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Kota Metro	2 dokumen	20,600,000	PAD	1,800,000	957%
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Kota Metro	2 dokumen	19,999,900	PAD	-	0%
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Metro	4 laporan	30,700,000	PAD	1,800,000	623%
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Metro	4 laporan	49,266,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Metro	100%	62,908,875,901		6,482,496,985	1149%
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Metro	681 orang	58,847,363,301	DAU	6,109,251,085	1158%
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Metro	1 dokumen	4,029,501,600	DAU	373,245,900	1021%
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Metro	1 dokumen	19,011,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/semesteran SKPD	Kota Metro	2 dokumen	13,000,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Metro	100%	114,665,000		10,000,000	-802%
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kota Metro	1 dokumen	45,665,000	PAD	2,000,000	-420%
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Metro	1 dokumen	47,000,000	PAD	8,000,000	-1455%
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Metro	30 orang, 11 puskesmas	22,000,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	12 bulan	482,454,440		101,904,840	2678%
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Metro	1 paket	14,265,800	PAD	-	0%
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Metro	5 paket	94,286,140	PAD	10,704,360	-1020%
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Metro	2 paket	79,745,500	PAD	32,542,200	6894%
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Metro	12 bulan	90,570,000	PAD	30,070,000	4970%
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Metro	12 bulan	203,587,000	PAD	49,997,000	3255%
1 02 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Kota Metro	4 jenis	201,679,848		21,230,000	1177%
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Metro	4 unit	201,679,848	PAD	#VALUE!	#VALUE!

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
1 02 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	12 bulan	238,044,992		37,999,992	1900%
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Metro	660 Lembar	6,600,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Metro	12 bulan	231,444,992	PAD	37,999,992	1964%
1 02 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	12 bulan	452,872,724		13,411,860	305%
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Metro	34 unit	42,670,000	PAD	-	0%
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Metro	138 unit	210,930,000	PAD	33,599,860	1895%
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Metro	2 Jenis	31,969,750	PAD	2,982,000	1029%
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Metro	1 unit	140,531,974	PAD	25,000,000	-1510%
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Metro	3 paket	26,771,000	PAD	1,830,000	734%
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kota Metro	11 Puskesmas, 2 RSUD	219,108,411,937		49,537,968,937	2921%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Banjarsari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Banjarsari	1 unit kerja	1,011,716,654	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	228,478,654	2917%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Metro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Metro, Imopuro	1 unit kerja	1,440,175,961	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	309,115,961	2733%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Yosomulyo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	1 unit kerja	1,600,153,938	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	365,953,938	2965%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Ganjar Agung, Ganjar Asri	1 unit kerja	883,986,444	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	167,536,444	2338%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Iringmulyo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Iringmulyo	1 unit kerja	1,243,828,470	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	252,828,470	2551%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Karangrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Karangrejo	1 unit kerja	671,080,128	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	72,080,128	1203%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Mulyojati	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Mulyojati, Mulyosari	1 unit kerja	756,000,155	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	252,000,155	5000%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Yosodadi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Yosodadi, Yosorejo	1 unit kerja	719,444,282	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	97,636,282	1570%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Purwosari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Purwosari, Purwoasri	1 unit kerja	710,534,577	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	253,534,577	5548%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Tejo Agung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Tejoagung, Tejosari	1 unit kerja	770,097,090	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	170,097,090	2835%
1 02 01 2.10 01	Puskesmas Margorejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo,	1 unit kerja	921,103,922	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	84,541,922	1011%
1 02 01 2.10 01	RSUD Jend. A Yani	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kota Metro	1 unit kerja	206,810,173,343	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	46,810,173,343	2926%
1 02 01 2.10 01	RSUD Sumbersari Bantul	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kota Metro	1 unit kerja	1,570,116,973	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	473,991,973	4324%
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Kota Metro	72,04 tahun	56,467,780,378		903,823,222	-158%
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Kota Metro	12 bulan	19,926,152,728		1,184,293,178	632%
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Imopuro	1 unit	240,000,000	DBH	-	0%
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Sumbersari Bantul	1 unit	2,969,550,000	PAD	500,000,000	2025%
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang diingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	Mulyojati	1 unit	435,000,000	DBH	-	0%
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Metro	156 unit	27,609,030	PAD	190,997,650	-8737%

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Metro	8 paket	10,756,240,000	DAK FISIK	-	0%
					RSUD Jend. A Yani	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	Kota Metro	5 paket	7,200,000,000	DAK FISIK	-	0%
					DINAS KESEHATAN	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	Kota Metro	5 paket	3,556,240,000	DAK FISIK	-	0%
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas regional/Regional Maintenance Center	Kota Metro	169 unit	133,749,350	PAD	23,250,650	-1481%
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Kota Metro	2 paket	4,439,052,870	PAD, DAK Nonfisik	26,410,000	-59%
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	Kota Metro	8 jenis	924,951,478	APBD	924,951,478	#DIV/0!
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	100%	35,992,434,550		2,073,197,200	-545%
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	2797 orang	100,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	2670 orang	33,700,000	PAD	18,300,000	-3519%
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	2543 orang	44,500,000	PAD	24,000,000	-3504%
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	12315 orang	70,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	15841 orang	28,534,200	PAD	7,259,000	-2028%
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	125742 orang	12,129,300	PAD	20,105,000	-6237%
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	14210 orang	54,018,000	PAD	2,675,000	-472%
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	33802 orang	219,470,200	PAD	5,529,800	-246%
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	4056 orang	41,170,000	PAD	5,830,000	-1240%
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Metro	229 orang	50,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	3111 orang	147,004,850	PAD	19,273,600	-1159%
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Metro	4446 orang	31,215,200	PAD	8,784,800	-2196%
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Metro	1 dokumen	61,500,000	PAD	3,500,000	-538%
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Metro	29 unit	30,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Metro	22 kelurahan	115,650,000	PAD	29,350,000	-2024%
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Metro	1 dokumen	108,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Metro	33 dokumen	80,084,000	PAD	10,000,000	-1110%
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Metro	300 orang	14,170,000	PAD	5,830,000	-2915%
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus	Kota Metro	6 dokumen	140,987,600	PAD	10,000,000	-662%
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kota Metro	18 dokumen	17,249,719,200	PAD	3,095,120,000	-1521%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
1	02	02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	Kota Metro	300 orang	20,000,000	PAD	-	0%
1	02	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Kota Metro	1 dokumen	116,500,000	PAD	3,500,000	-292%
1	02	02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Metro	13 fasyankes	37,000,000	PAD	13,000,000	-2600%
1	02	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Kota Metro	2 RS	7,145,000,000	PAD	1,145,000,000	1908%
				RSUD Sumbersari Bantul	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Kota Metro	12 bulan	1,145,000,000	PAD	145,000,000	1450%
				RSUD A. Yani	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Kota Metro	12 bulan	6,000,000,000	PAD	1,000,000,000	2000%
1	02	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kota Metro	11 puskesmas	9,622,622,000	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Banjarsari	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Banjarsari	12 bulan	681,937,945	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Metro	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Metro, Imopuro	12 bulan	907,156,000	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Yosomulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	12 bulan	996,376,000	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Ganjar Agung, Ganjar Asri	12 bulan	768,449,830	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Iringmulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Iringmulyo	12 bulan	892,658,576	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Karangrejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Karangrejo	12 bulan	615,421,099	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Mulyojati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Mulyojati, Mulyosari	12 bulan	652,752,187	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Yosodadi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Yosodadi, Yosorejo	12 bulan	703,085,416	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Purwosari	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Purwosari, Purwoasri	12 bulan	632,298,400	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Tejo Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Tejoagung, Tejosari	12 bulan	645,031,880	DAK NONFISIK	-	0%
				Puskesmas Margorejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo, Sumbersari Bantul	12 bulan	895,840,667	DAK NONFISIK	-	0%
				BOK Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen operasional pelayanan dinas kesehatan	Kota Metro	1 dokumen	1,231,614,000	DAK NONFISIK	-	0%
1	02	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Metro	11 Puskesmas	330,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Banjarsari	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Banjarsari	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Metro	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Metro, Imopuro	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Yosomulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Ganjar Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Ganjar Agung, Ganjar Asri	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Iringmulyo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Iringmulyo	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Karangrejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Karangrejo	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Mulyojati	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Mulyojati, Mulyosari	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Yosodadi	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Yosodadi, Yosorejo	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Purwosari	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Purwosari, Purwoasri	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
				Puskesmas Tejo Agung	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Tejoagung, Tejosari	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
	Puskesmas Margorejo	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Margorejo, Margodadi, Rejomulyo, Sumbersari Bantul	12 bulan	30,000,000	PAD	-	0%
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Metro	11 fasyankes	89,460,000	PAD	63,860,000	24945%
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Metro	2 dokumen	71,490,200		80,900	11%
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Kota Metro	11 Puskesmas	17,460,100	PAD	1,195,900	-641%
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Metro	11 Puskesmas	54,030,100	PAD	1,276,700	242%
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	100%	477,702,900		15,000,000	-304%
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	Kota Metro	40 unit	354,302,900	PAD	15,000,000	-406%
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Kota Metro	85 unit	51,400,000	PAD	-	0%
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Metro	15 dokumen	72,000,000	PAD	-	0%
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Metro	93%	1,071,857,500		9,500,000	-88%
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Metro	11 Puskesmas	90,500,000		9,500,000	-950%
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Metro	2 dokumen	50,000,000	PAD	-	0%
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Metro	1 dokumen	40,500,000	PAD	9,500,000	-1900%
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Kota Metro	100%	981,357,500			0%
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Kota Metro	5 kali	981,357,500	PAD, DAK Nonfisik	-	0%
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Kota Metro	94%	169,163,100		9,250,000	-518%
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, serta UMOT yang memiliki izin	Kota Metro	100%	0			#DIV/0!
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Metro	81 dokumen	0	PAD	-	#DIV/0!
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	Kota Metro	100%	141,413,100		7,000,000	-472%
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Metro	4 dokumen	141,413,100	PAD (Pemulihan ekonomi umkm)	7,000,000	-472%
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	Kota Metro	100%	27,750,000		2,250,000	-750%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN				SELISIH	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	(Rp)	(%)
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan	Kota Metro	30 PIRT	27,750,000	PAD	- 2,250,000	-750%
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Kota Metro	0,35 (tidak sehat)	1,821,620,000		- 94,170,000	-492%
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	Kota Metro	100%	369,774,000		- 71,640,000	-1623%
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Metro	1 dokumen	369,774,000	PAD	- 71,640,000	-1623%
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Metro	22 kelurahan	53,196,000		- 22,530,000	-2975%
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Metro	1 dokumen	53,196,000	PAD	- 22,530,000	-2975%
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Kota Metro	100%	1,398,650,000		-	0%
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Metro	1 dokumen	1,398,650,000	PAD	-	0%
					333,221,061,270			

**RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2023**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN		
						I	II	III	IV			
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	angka	72.04	-	-	-	72.04	Rp	343,221,061,270	
			Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	95	23.75	23.75	23.75	23.75			
			Jumlah kasus kematian ibu	kasus	3	-	1	1	1			
			Jumlah kasus kematian bayi	kasus	11	2	3	3	3			
			Prevalensi stunting pada anak balita	%	9	2.25	2.25	2.25	2.25			
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	%	95	23.75	23.75	23.75	23.75			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp	283,690,640,292
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	14	6	2	3	3	Rp	183,635,450
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp	62,908,875,901
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp	114,665,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp	482,454,440	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp	238,044,992	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis	4	1	1	1	1	Rp	201,679,848	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang-barang milik daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp	452,872,724	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	puskesmas dan rsud	11 dan 2	3	3	3	4	Rp	219,108,411,937
			Jumlah kasus kematian neonatal	kasus	9	2	2	2	3	Rp	56,437,753,378	
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	12	3	3	3	3			
			Persentase balita wasting	%	5.6	1.4	1.4	1.4	1.4			
		Persentase ibu hamil KEK	%	12	3	3	3	3				

Masyarakat		Persentase anemia pada ibu hamil	%	18	4.5	4.5	4.5	4.5		
		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	25	25	25	25		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	23.75	23.75	23.75	23.75		
		Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunisation)	%	100	25	25	25	25		
		Insiden Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	194.39	48.59	48.59	48.59	48.59		
		Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	%	12.99	3.25	3.25	3.25	3.24		
		Angka kesakitan (incidence rate) DBD	per 100.000 penduduk	67.81	16.95	16.95	16.95	16.95		
		Prevalensi HIV AIDS	%	0.013	0.003	0.003	0.003	0.003		
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	%	81.8	20.45	20.45	20.45	20.45		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan	12	3	3	3	3	Rp 19,926,125,728	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 35,992,434,550	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	dokumen	2	-	1	-	1	Rp 71,490,200	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	%	100	25	25	25	25	Rp 447,702,900	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	93	23	23	23	24	Rp 1,071,857,500	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas	11	2	3	3	3	Rp 90,500,000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 981,357,500
Program Sediaan Farmasi, Alat		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	94	23	24	24	23	Rp 169,163,100	

Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp	141,413,100
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp	27,750,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Indeks Keluarga Sehat	angka	0.35	-	-	-	0.35	Rp	1,821,620,000
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	%	100	25	25	25	25	Rp	369,774,000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	kelurahan	22	5	5	6	6	Rp	53,196,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengembangan dan pelaksanaan UKBM	%	100	25	25	25	25	Rp	1,398,650,000

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST.,M.Kes

NIP. 197203101997031006



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 02 Metro, Kode Pos 34111
Telp. (0725) 44454, dinkeskotametrol@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO
NOMOR : 105/KPTS/D-02/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO,

- Menimbang : a. dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022, perlu membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang akan mengevaluasi dan mengelola langkah-langkah perbaikan, dan membenahan SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Metro;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kota Metro;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah :

1. Ketua :

- Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya melakukan evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro;

2. Sekretaris :

- Memberikan arahan dan Petunjuk secara teknis tata cara pelaksanaan Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro;

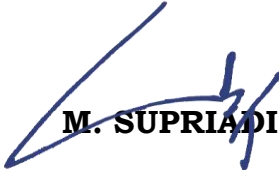
3. Anggota :

- Melakukan koordinasi dan mobilitas anggota tim untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP;
- Menerima dan mengumpulkan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP;
- Menyerahkan data/bahan Evaluasi SAKIP yang terkumpul kepada Sekretaris TIM.

- KETIGA : Tim Evaluasi SAKIP dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,



M. SUPRIADI

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Nomor : 105 /KPTS/D-02/01/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro

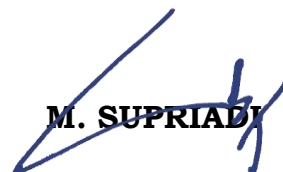
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan
Hubungan Masyarakat

Anggota :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Shinta Marvina Darmawan, SKM
6. Denia Pramudiah A, S.Gz
7. Arief Dharma Laksana, S.E
8. Muhammad Rafiq
9. Novian Dwi Hetrianto, A.Md.Kes

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,


M. SUPRIADI



PEMERINTAH KOTA METRO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DINAS KESEHATAN KOTA METRO



**DINAS KESEHATAN
KOTA METRO**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2023
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro  Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST., M.Kes NIP. 197203101997031006
Nama SOP		Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;3. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;5. Peraturan Walikota Metro No. 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja		<ol style="list-style-type: none">1. Renstra OPD2. Format penyusunan SAKIP3. Dokumen Perjanjian Kinerja4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD5. Laporan Realisasi Keuangan dan Perangkat Komputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Rumusan rencana program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan untuk periode 1 tahunan anggaran.2. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP tidak akan berjalan lancar.		Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy

SOP : PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ka. Sub.bag Perencanaan	Tim Sakip	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Out Put	Keterangan
1.	Memerintahkan penyusunan Sakip	Mulai					Disposisi Surat	10 Menit	Diposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat		↓				Format Penyusunan Sakip	2 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepadamasing-masing bidang dan sekretariat			↓			Format Penyusunan Sakip	1 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					↓	Format Penyusunan Sakip	3 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul		↓	↓	↓		Format Penyusunan Sakip	4 Hari	Format Penyusunan SAKIP	-
6.	Membuat konsep Dokumen SAKIP dan mengajukan kepada Kepala Dinas		↓	↓			Draf SAKIP	2 Hari	Draf SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
7.	Mengoreksi konsep Dokumen SAKIP		Ya	Tidak			Dokumen SAKIP	1 Hari	Dokumen SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
8.	Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Kepala Dinas kemudian diteruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian	↓					Dokumen SAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen Sakip	Konsep Sakip
9.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					↓	Konsep Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar	Dokumen Sakip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ka. Sub.bag Perencanaan	Tim Sakip	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Out Put	Keterangan
10.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP					↓ selesai	Dokumen SAKIP	1 jam	Dokumen Sakip	-

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Metro

Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST., M.Kes
 NIP. 197203101997031006



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. A. Yani No. 02 Kota Metro Telp. (0725) 44454 Fax. (0725) 43531
Email: dinkeskotametro1@gmail.com Website: www.dinkes.metrokota.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI INTERNAL LAKIP DINAS KESEHATAN KOTA METRO TAHUN 2023

Pada Hari Senin tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Telah diadakan rapat Evaluasi Internal Lakip Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023 dengan hasil pembahasan :

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	102,22%	108 %	
2	Angka Harapan Hidup	72,04	75,14	104%	
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	3	0	100%	Tidak ada kasus kematian ibu
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	11	7	157%	
5	Prevalensi Stunting pada Anak Balita	9%	4,07%	221%	
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TBC) (<i>suscces rate</i>)	95%	96,72%	102%	
7	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	93%	93%	100%	
8	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94%	100%	106,3%	
9	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,4	114,2%	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 9 indikator sudah memenuhi target 100 %.

Demikianlah berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Bidang SDK,

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,



SABARINA AMIR, S.Farm., Apt
NIP.19850705 201001 2 016



DANIEL, SKM., M.Kes
NIP. 19780817 200312 1 008

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat,

Kepala Bidang P2P,



DIAH MEIRAWATI, SKM., M.Kes
NIP. 19800801 200003 2 002



VERAWATI NASUTION, SKM., M.Kes
NIP. 19800801 200003 2 002

Sekretaris Dinas Kesehatan



dr. ACHMAD REDHO AKBAR
NIP. 19760411 200604 1 003

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro



Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST. M.Kes
NIP.19720310 199703 1 006

Keterangan :

Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode Warna
Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	
Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	
55% s.d 75%	Cukup (C)	
Kurang dari 55%	Kurang (K)	

DOKUMENTASI

Rapat Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro



PENGHARGAAN WALIKOTA METRO

NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
TAHUN 2021		
1	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2021 pada 2 Kategori : STBM Berkelanjutan dan STBM Berkelanjutan Kategori Supply	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2	Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di atas 95% Tahun 2021	BPJS
3	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terbaik se-Sumatra Tahun 2021	POLRI
4	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2021 kepada DPMPTSP	Menpan Reformasi Birokrasi
5	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2021 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menpan Reformasi Birokrasi
6	Kota Kecil Terbaik Atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menpan Reformasi Birokrasi
7	Unit Kerja Pelayanan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menpan Reformasi Birokrasi
TAHUN 2022		
1	IPM Kota Metro tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi setelah Kota Bandar Lampung : Bandar Lampung 78,01 Metro 77,89	BPS
2	Keberhasilan pengendalian inflasi terbaik se-Sumatra dan uruan ketiga Tingkat Nasional Tahun 2022	Menko bidang Perekonomian RI

NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
3	Piala Kategori Local Product Movement pada ajang Tribun Lampung Award 2022, penghargaan bagi Kepala Daerah yang pro dalam pengembangan UMKM	TRIBUN Lampung
4	Kepala Daerah Terinovatif dalam Pengembangan Potensi Wisata dan UMKM	Managemen Global Group
5	One Village One Product (OVOP) Bintang 1 kepada IKM KerajinanTungku Sejahtera, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara	Kementerian Perindustrian RI
6	Terbaik I Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Tahun 2022	Piagam Penghargaan Kanreg V BKN Award
7	Special Mention – Pilot Project SIASN pada BKN Award Tahun 2022	BKN
8	Partisipasi Walikota Metro sebagai Narasumber Pemulihan Ekonomi untuk Lampung yang Lebih Kuat pada Temu Lampung Economic Outlook Tahun 2022	Lampung Post
9	Partisipasi Walikota Metro sebagai Narasumber Webinar Hari Air Sedunia Tahun 2022 Groundwater – Make The Invisible Visible “Upaya Bersama Dalam Menjaga Kualitas Air Minum Aman Yang Berkelanjutan”	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

TAHUN 2023

1	Penghargaan Kota Bebas Frambusia dari KEMENKES RI tanggal 26 Januari 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.	Penghargaan Kategori Daerah Pilot Project Dashboard E Monev Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2023	Kementerian Kesehatan Rebulik Indonesia
3.	Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Padapa tanggal 13 November 2023	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

FOTO PIAGAM/SERTIFIKAT





MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN
SWASTI SABA PADAPA**

kepada :

KOTA METRO

Atas Keberhasilan dalam
Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023

(Kep.Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/2087/2023)

Jakarta, 13 November 2023

MENTERI KESEHATAN,



BUDI G. SADIKIN